

DINAMIKA POLITIK MASA REVOLUSI: PERBEDAAN PANDANGAN ELITE PUSAT DENGAN ELITE JAWA TIMUR

Ari Sapto

Jurusan Sejarah FIS Universitas Negeri Malang

Abstract. Defined as main problem nowadays, relationship between district prefecture and central government have not done yet. Identified by many years ago, this problem has emerged during Independence revolution periods. Direction, purposes and through revolution path have become discussion between elite ended with contradiction. It was caused by different sightseeing of the other elites on East Java. Powerful effects of politics reality, East Java culture and self interest influence rationale thoughts.

Key words : Dynamics, Politics, Revolution periods, Relationship

Perbedaan pandangan antara elite pusat dengan elite di Jawa Timur tampak menguat sejak Moh. Hatta menggantikan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri (PM). Ada pemikiran dan kebijakan Hatta yang berseberangan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh sebagian elite di Jawa Timur. Menurut John Ingleson terdapat empat masalah yang menjadi perhatian Hatta sejak masih sekolah di Belanda. Keempat masalah itu adalah keyakinannya tentang demokrasi parlementer dengan banyak partai merupakan bentuk pemerintahan terbaik bagi Indonesia, pembaharuan sosial secara mendasar, perjuangan menciptakan ekonomi yang lebih adil, dan partai politik yang didasarkan pada kader-kader yang mempunyai kesadaran politik (Ingleson, 2005: 36-47). Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 adalah keberhasilan merealisasikan salah satu pemikirannya itu. Syahrir, sahabatnya sejak belajar di negeri Belanda dan sama-sama bergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI), menjadi PM pertama pada sistem yang didambkannya.

Hatta menghindari pengerahan massa yang dapat menimbulkan kekerasan. Bisa jadi dalam dirinya muncul kekhawatiran mobilisasi massa dapat tidak terkendali dan membawa kekacauan yang mengarah pada

pertumpahan darah. Kekacauan dan kekerasan hanya akan memperburuk keadaan, sehingga harus dihindari. Kepercayaan pada kekuatan konsensus menimbulkan keyakinan bahwa inilah satu-satunya cara yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Dapat dimengerti jika sepanjang periode revolusi, Hatta tokoh yang paling gigih memperjuangkan strategi diplomasi. Hatta juga tidak percaya terhadap gerakan-gerakan tidak terkendali yang berasal dari bawah. Meskipun tujuan gerakan semacam ini juga berusaha mendapatkan dan mempertahankan dukungan internasional dalam perjuangan melawan Belanda. Bagi Hatta, Republik harus menunjukkan sikap moderat dan bertanggung jawab kepada dunia, terutama kepada Amerika Serikat (Ingleson, 2005: 64).

Diplomasi dan Perjuangan

Diplomasi dan perjuangan menjadi sumber konflik di antara kekuatan-kekuatan revolusi. Sukarno-Hatta sebagai pengendali pemerintahan menjalankan diplomasi dengan Sekutu dan Belanda sebagai strategi utamanya. Perundingan menjadi penting untuk mendapat pengakuan secara *de jure* oleh dunia internasional. Dengan pengakuan internasional meskipun wilayah dikuasai

musuh dan pemerintah resmi mengungsi, namun dunia internasional tetap mengakui pemerintahan di pengasingan tersebut (Verslag perjalanan Presiden ke Jawa Timur, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 409).

Mencermati perjalanan politik Hatta sebelumnya, dapat dikatakan diplomasi merupakan sarana yang tepat untuk implementasi pengalaman-pengalamannya selama belajar di negeri Belanda, ketajaman intelektualnya, dan pemahamannya yang luas tentang Sejarah Eropa. Dalam pandangan John Ingleson, Hatta merupakan perunding terlatih, mengerti orang Belanda, dan juga dihormati orang Belanda (Ingleson, 2005: 65). Di sisi lain, dalam soal diplomasi Sukarno tidak banyak berpengaruh, meskipun dirinya selalu mendukung. Diplomasi di serahkan kepada Syahrir dan Hatta. Keduanya seolah membagi periode 5 tahun revolusi untuk peran masing-masing. Syahrir pada paruh pertama dan Hatta sisanya.

Program Kabinet Hatta meliputi berunding terus atas dasar persetujuan Renville, membentuk Negara Indonesia Serikat, mengadakan rasionalisasi, dan pembangunan (Verslag perjalanan Presiden ke Jawa Timur, Kementerian Penerangan, no. inv. 409). Dari keempat program ini, program pertama hingga ketiga jelas kurang bisa diterima oleh sebagian elite di Jawa Timur. Berdasar analisis elite di Jawa Timur, hingga bulan Nopember 1948, dengan melemahnya tenaga revolusi, karena merosotnya aliran kiri setelah Peristiwa Madiun, maka terdapat dua jalan mencapai kemerdekaan. Jalan yang ditempuh memang berbeda, tetapi tujuannya sama, kemerdekaan Indonesia. Kedua jalan ini sulit dikompromikan. Pertama, melalui pemerintahan federal. Kedua, melalui jalan konfrontasi fisik terus menerus hingga kekuasaan Belanda lenyap. Jalan pertama dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu perjuangan parlementer, pemerintah Republik harus menunjukkan kerjasama militer dengan

militer Belanda, dan angkatan bersenjata Republik harus tunduk pada peraturan yang bersifat mengikat. Khusus yang terakhir, peraturan yang akan dibuat dipastikan akan melupakan dasar-dasar jiwa bangsa Indonesia. Usaha melalui pemerintahan federal mengharuskan Republik mengadakan perundingan-perundingan yang lama dengan Belanda. Dalam hal ini memungkinkan pihak Republik memberikan konsensus-konsensus kepada pihak Belanda. Tujuan ke arah ini menyebabkan tersentralisasinya seluruh kekuatan senjata Republik dan merosotnya kekuatan-kekuatan revolusioner yang cakap. Juga hilangnya inisiatif orang-orang untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan memperkuat persenjataan rakyat. Akibat yang lain hilangnya semangat berbangsa di kalangan rakyat yang pada saat seperti ini sangat diperlukan. Hilangnya kekuatan revolusioner, inisiatif, dan semangat berbangsa menyebabkan Republik akan menemui kelemahan. Organisasi-organisasi yang baik tercerai berai atau hilanglah *kern-kern* revolusi (Keadaan / Situasi Politik Nopember 1948, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 441).

Demikian pula keterlibatan PBB dalam upaya menyelesaikan perselisihan antara Indonesia-Belanda disambut setengah hati. Ada perasaan keberatan untuk percaya sepenuhnya. Dalam pandangan elite, sebagai lembaga dunia PBB tidak lepas dari kepentingan-kepentingan. Oleh karena itu badan ini dipandang tidak begitu cepat menyelesaikan masalah. Keuntungan yang diperoleh pihak Republik juga tidak begitu banyak (Reaksi Rakyat, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 409). Dalam suatu rapat TCDT (Territorial Commando Djawa Timur) yang dihadiri elite militer dan sipil pada tanggal 12 Pebruari 1948 atas pertanyaan seorang peserta tentang Persetujuan Renville, Panglima TCDT menjawab bahwa perundingan bukan urusan tentara, sebagai tentara hanya menjalankan

perang dengan tetap menghendaki tetap merdeka 100% (Wejangan Panglima TCDT, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 167).

Sebagai contoh penolakan elite terhadap strategi perundingan ditunjukkan pada kasus pelarangan bicara untuk Bung Tomo. Presiden Soekarno, sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang, memerintahkan Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia agar Bung Tomo menghentikan pidatonya di depan corong radio dan juga pidato di muka umum (Perintah Presiden RI No. P.T./56, Sekretariat Negara RI, ANRI, no. inv. 933). Larangan berlaku sejak tanggal 17 Desember 1947 dan dicabut tanggal 27 Januari 1948 (Perintah Presiden RI No.1/P.T./48, Sekretariat Negara RI, ANRI, no. inv. 933). Isi pidato Bung Tomo yang menolak setiap upaya perundingan dan senantiasa mengobarkan semangat rakyat dipandang merugikan serta menyukarkan diplomasi Indonesia. Pidato tanggal 15 Desember 1947 dapat merugikan karena pengaruhnya di kalangan internasional, terutama dapat mempengaruhi Dewan Keamanan (Kawat dari Perdana Menteri kepada Wakil Perdana Menteri tanggal 17 Desember 1947, Sekretariat Negara RI, ANRI, no. inv. 933). Bung Tomo juga mendapat telegram dari Amir Syarifuddin, isinya Bung Tomo harus memilih: tetap menjadi jenderal namun tidak boleh berpidato, atau berhenti jadi jenderal tetapi bisa berpidato. "*Persetan, ora dadi jenderal ya ora patheken*" (Persetan, tidak jadi jenderal tidak sakit *pathek*, kusta) (Sutomo, 2008: 63), demikian tanggapan Bung Tomo atas telegram Amir. Demikian takutnya terhadap pengaruh pidato-pidato yang diucapkan Bung Tomo menyebabkan pemerintah melarang anggota tentara mendengarkannya.

Tentara Profesional dan Tentara Revolusi

Sejak Hatta duduk sebagai PM segera tampak aliansi kekuatan antara dirinya dengan kelompok tertentu dalam Angkatan Perang. Kelompok itu terdiri dari bekas perwira KNIL, seperti Jatikusumo, Suryadarma, Simatupang, dan Nasution. Diidentifikasi sebagai kelompok pembaharu, para perwira itu dapat mengambil alih kendali aparaturnya pertahanan yang sebelumnya dipegang oleh Amir Syarifuddin. Keberhasilan ini sebagian disebabkan masalah kesehatan yang demikian parah dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sejalan dengan pemikiran kelompok pembaharu dalam tubuh Angkatan Perang, Hatta berkeinginan untuk membentuk sebuah ketentaraan kader yang kecil dan berdisiplin tinggi. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah pertama menuju terbentuknya suatu ketentaraan federal NIS dan sebagai modal utama dalam setiap persetujuan diplomatik dengan Belanda (Anderson, 1976: 38).

A.H. Nasution dalam salah satu tulisannya menyatakan "saya sendiri dan beberapa teman yang sepaham tetap menganut ide rasionalisasi, yaitu dalam arti efisiensi, dengan pembentukan pasukan-pasukan yang sederhana yang disesuaikan dengan fungsi perang gerilya, pemakaian pangkat-pangkat rendah, kecakapan teknis, dsb" (Nasution, 1968: 142). Jadi yang kehendaki kelompok pembaharu ini adalah tentara yang kecil, berdisiplin, baik persenjataannya, terlatih, dapat dikendalikan dan dapat dipercaya. Di sini kepentingan keduanya (Hatta dan Nasution) bertemu, meskipun dengan alasan yang berbeda. Hatta lebih karena faktor efisiensi, sementara Nasution dan kawan-kawan karena profesionalisme.

Mulai bulan Pebruari 1948, atas perintah Kabinet Hatta telah dilakukan pengurangan tenaga militer. Semula di Jawa terdiri dari 7 divisi ditambah laskar-laskar, dirampingkan menjadi 2 divisi dan 2 brigade

serta 1 kesatuan reserve. Anggota-anggota militer yang terkena program ReRa dipindahkan ke usaha-usaha pembangunan, seperti bidang pertanian, industri kecil atau perusahaan - perusahaan (Pengurangan Angkatan Perang, Delegasi Indonesia, ANRI, no. inv. 707). Rencananya, bagi tenaga yang kena ReRa akan dibangun sumber usaha baru, diberikan penghidupan yang layak. ReRa bukan pemecatan, hanya pengalihan dari yang kurang produktif ke yang lebih produktif. ReRa dilakukan karena tentara yang tidak lagi produktif menjadi beban untuk masa datang. Jika tidak dilaksanakan maka diprediksi akan terjadi inflasi yang hebat. Negara tidak mampu menggaji 463.000 orang tentara (Hatta, 1976: 22-25). Dasar ReRa adalah perimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Slogan pemerintah “Satu Tentara Satu Komando” mengharuskan bentuk dan susunan organisasi tentara yang efektif. Keanggotaan tentara yang kecil namun efektif mudah dibiayai dan mudah diperlengkapi oleh negara. Dalam kondisi demikian semangat dan disiplinnya tetap dapat dipelihara dengan baik. Kekuatan tentara tidak bergantung kepada banyak jumlahnya, malahan kepada efektif tidaknya susunannya, baik atau tidak moril dan disiplinnya, serta kecukupan perlengkapannya. Program ReRa dilakukan dengan 3 bentuk.

1. Melepaskan mereka yang sukarela mau meninggalkan tentara, di antaranya ada yang ingin kembali kepada pekerjaannya yang lama sebagai guru, sebagai partikelir dan lain-lain.
2. Menyerahkan mereka kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda yang menyiapkan obyek-obyek usaha bagi mereka.
3. Mengembalikan seratus ribu kembali ke dalam masyarakat desa (Hatta, 1976: 27-28).

Tentang bagaimana penyelenggaraan ReRa selanjutnya, pemerintah menunjuk beberapa perwira, yaitu Jenderal Mayor

Nasution, Jenderal Mayor Susalit, Jenderal Mayor Suwardi, untuk memikirkan lebih lanjut.ⁱ Ketiganya supaya selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 20 April 1948 jam 12.00 siang sudah menyampaikan usul tentang ReRa Angkatan Perang. Presiden memberikan catatan agar calon-calon opsir yang akan diajukan janganlah orang-orang yang aktif di dunia politik (Surat Perintah Presiden No.8/P.T./48 kepada Panglima Besar Angkatan Perang Mobil, Sekretariat Negara RI, ANRI, no. inv. 292). Hasil kerja yang diotaki oleh panitia ini yang nantinya menimbulkan penentangan, terutama oleh elite militer Jawa Timur adalah Penetapan Presiden No. 14 Tahun 1948 tanggal 4 Mei 1948. Penetapan ini oleh pemerintah dianggap sebagai jalan ke luar adanya kekacauan dengan ke luarnya Penetapan Presiden No. 9/1948 dan UU Baharuddin. Persoalan serius dengan adanya kedua peraturan tersebut adalah seputar pimpinan Angkatan Perang. Kebijakan reorganisasi menempatkan kekuasaan militer tertinggi terpusat di tangan KSAP (Kepala Staf Angkatan Perang), Komodor Udara Suryadarma. Di mana posisi PBAP Jenderal Sudirman? Nasution menulis “pada mulanya direncanakan agar Panglima Besar juga berada di bawah komando KSAP, akan tetapi mengingat soal-soal pribadi dewasa itu, maka PBAP Mobil berdiri langsung di bawah Menteri Pertahanan”.ⁱⁱ Bagi sebagian elite militer, khususnya eks Peta, ini upaya mengurangi wewenang Jenderal Sudirman, sekaligus kemenangan kelompok eks KNIL menguasai tampuk pimpinan AP.

Program ReRa bertentangan dengan jajaran elite militer di Jawa Timur yang senantiasa menekankan sifat populis tentara revolusi. Suatu tentara yang terikat kuat dengan masyarakat pedesaan atau kota kecil di pedalaman. Tentara yang mengandalkan kekuatan semangat perjuangan dan dukungan masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan penuh dari kolonialisme Barat

(Anderson, 1976: 2). Seperti telah tersebut di muka, pandangan ini lahir di samping karena pengalaman kebersamaan di medan pertempuran, juga sebagian besar elite militer di Jawa Timur berlatar belakang Peta. Pengetahuan kemiliteran dalam Peta lebih menitikberatkan kekuatan semangat daripada pemahaman teknis militer.

Menyingkapi program ReRa tanggal 26 Mei 1948 pimpinan divisi, staf, dan komandan batalyon mengadakan pertemuan. Pertemuan yang dimulai pukul 20.00 dan baru berakhir pukul 01.00 malam diisi pandangan Panglima Divisi tentang ReRa dan kondisi organisasi militer di pusat. Disampaikan bahwa program ReRa ada hubungannya dengan rencana Jenderal Spoor dan PM Beel. Bila pemerintah meneruskan program ReRa berarti merealisasikan rencana Spoor. Menurut Panglima Divisi susunan pimpinan pusat mengecewakan. Seolah-olah terdapat 2 Panglima Besar, yaitu keberadaan Wakil Panglima Besar yang dijabat Jenderal Mayor Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang yang dijabat oleh Komodor Suryadarma. Kondisi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan bagi pelaksanaan cita-cita 17 Agustus 1945. Dengan adanya kenyataan itu Panglima Divisi menetapkan haluannya sendiri yang menurutnya sesuai dengan cita-cita 17 Agustus 1945 (Catatan tentang Rapat penting pada tanggal 26-5-'48, Yogya Dokumenten, ANRI, no. inv. 330). Pada tanggal 30 Mei 1948 diadakan rapat lagi. Kali ini pembicaraan membahas tentang hasil pertemuan panglima-panglima divisi yang dilakukan di Solo. Hasil pertemuan para panglima divisi pada intinya menolak ReRa dengan alasan akan menimbulkan perpecahan di kalangan tentara. Untuk itu Penetapan Presiden No. 14 Tahun 1948 harus dicabut. Bila tuntutan pencabutan Penetapan tidak ditanggapi maka para komandan serentak akan meletakkan jabatan. Para panglima yang hadir juga mengangkat Sudirman sebagai Bapak *Vrijheidsstrijder* yang senantiasa

ditaati. Pertemuan Solo juga menghasilkan kesepakatan masing-masing divisi mengirimkan wakil sebagai delegasi untuk menyampaikan hasil pertemuan para panglima ke Panglima Tertinggi, Panglima Besar, Menteri Pertahanan, dan Badan Pekerja KNIP. Dari Divisi VI Jawa Timur diwakili oleh Letkol Kretarto, Mayor Kadim, Letkol Suroto, dan Letkol Sidik Arselan (Pelapuran Resmi Tentang: Rapat/Pertemuan Rahasia di MPP pada tanggal 30 Mei 1948, Yogya Dokumenten, ANRI, no. inv. 330). Atas apa yang telah dilakukan dalam dua pertemuan itu, Kolonel Sungkono dipersalahkan oleh pemerintah pusat. Panglima Divisi VI ini dipersalahkan karena dianggap melakukan hasutan-hasutan agar tidak mentaati pemerintah pusat, menghina pemerintah, dan menyiarkan kabar bohong (Penuntutan Bekas Panglima Div. VI Kolonel Sungkono, Yogya Dokumenten, ANRI, no. inv. 330). Akibatnya, Kolonel Sungkono dicopot dan digantikan oleh Kolonel Bambang Supeno.

Kolonel Sungkono juga dituduh oleh Markas Besar Tentara (MBT) tidak disiplin dan tidak mau menyerahkan komando kepada Kolonel Bambang Supeno yang ditunjuk oleh MBT. Pemerintah pusat beralasan penggantian ini dalam rangka program ReRa. Mengapa Sungkono kena ReRa? Berbeda dengan elite pusat, sebagian elite di Jawa Timur meyakini bahwa pergantian itu karena Sungkono dianggap golongan perwira kurang terpelajar dan diejek kurang fasih berbahasa Belanda (Rahardjo, 1996: 23). MBT membentuk Dewan Tata tertib Opsir Tinggi (DTTOT) di bawah pimpinan Jenderal Mayor A.H. Nasution. Dewan mengadili Sungkono yang dituduh membangkang. Padahal Sungkono bukannya tidak mau menyerahkan jabatannya, tapi ingin menetapkan dulu hari untuk mengadakan timbang terima di depan staf dan pasukan. Rencana Sungkono dianggap salah oleh Nasution. Putusan DTTOT, di samping dicopot dari jabatannya,

Sungkono diturunkan pangkatnya yang sebelumnya Kolonel menjadi Letnan Kolonel (Rahardjo, 1996: 23-24). Sungkono pada mulanya tidak menerima hukuman itu. Setelah menghadap Presiden Sukarno dan Panglima Besar, hukuman itu diterima. Keduanya menganggap persoalannya bukan indisipliner, meskipun demikian disarankan agar Sungkono menerima hukuman itu. Ketaatan dan kepatriotan perlu ditunjukkan (Rahardjo, 1996: 24).

Presiden Sukarno melihat tentara Jawa Timur dapat dipakai contoh. Tentara Jawa Timur dipandang tidak banyak omong, tetapi terus bekerja, meskipun banyak di antaranya gugur dalam peperangan mempertahankan kemerdekaan (Verslag perjalanan Presiden ke Jawa Timur, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 409). Sesuatu yang tersirat dari pernyataan Presiden bahwa semangat berjuang lebih didepankan daripada kemampuan teknis militer. Pandangan Sukarno lebih cocok dengan elite Jawa Timur. Sukarno lebih suka mengandalkan kekuatan massa dan ingin mencapai tujuan revolusi dengan kekuatan itu. Sukarno percaya rakyat akan menjadi kekuatan yang hebat bila kesadarannya dibangkitkan. Untuk keperluan membangkitkan kesadaran dan menggelorakan semangat, Sukarno sering menggunakan istilah-istilah dan bahasa yang radikal. Titik pertemuan lain terletak dalam prinsip *manunggal*. Bagi Sukarno persatuan teramat penting, sebagai jembatan emas untuk mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Seperti yang dianginkannya: Indonesia yang berdaulat, bersatu, dari Sabang hingga dan Merauke, tanpa kapitalisme dan imperialisme. “Saya bukan orang komunis, saya tidak memihak! Saya hanya menghendaki kesatuan Indonesia dan persaudaraan di antara berbagai gerakan”(Onghokham, 1977: 7; Onghokham, 2009), demikian pernah dikatakannya.

Meskipun dalam beberapa segi ada persamaan dengan Sukarno, tetapi elite di Jawa Timur pada dasarnya relatif jauh dari pusat kekuasaan. Persaingan politik yang relatif tinggi di pusat tidak terjadi di daerah, sehingga mendorong tentara dan laskar untuk lebih menfokuskan diri terutama pada masalah-masalah militer. Hasilnya, tercapai toleransi dan kerjasama antara keduanya. Sementara Sukarno sendiri lebih tertarik dunia politik daripada militer dan, seperti dikatakan Onghokham, berdiri seorang diri.ⁱⁱⁱ Kenyataan seperti ini membawa akibat yang sudah dapat diduga. Pandangan-pandangan elite di Jawa Timur tidak dipahami, tidak didengar dan tidak diakomodir oleh penentu kebijakan di pusat.

Usaha menyelesaikan perlawanan Sayap Kiri dalam Peristiwa Madiun melalui operasi militer adalah bukti hubungan tak harmonis antara elite pusat dan elite militer di Jawa Timur. Pada mulanya elite militer Jawa Timur enggan berpartisipasi dalam operasi pemulihan keadaan di Madiun dan sekitarnya. David Charles Anderson menegaskan bahwa penyebabnya “*the very bad personal relationship between the Narotama leader and Deputy Commander Nasution ever since the publication of the reorganization measures in May*”(Anderson, 1976: 32). Di samping itu, para pemimpin militer di Jawa Timur mencurigai bahwa operasi pemulihan keamanan dipakai untuk mengikis habis semangat revolusioner di antara tentara Republik. Tujuan akhirnya sebagian dari tentara dibaurkan ke dalam angkatan bersenjata federal yang diwarnai etos militer Belanda. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat arsitek di tingkat pusat terdiri dari mantan perwira KNIL.

Peristiwa Madiun yang terjadi pada 18 September 1948 menunjukkan adanya perbedaan yang tajam antara kesatuan-kesatuan di Jawa Timur dengan komando tertinggi militer. Lebih jauh Anderson (1976: 53) menyatakan pendapatnya, bahwa:

“Within this military struggle over power and ideology, East Java occupied a key position as an entrenched and highly articulate source of opposition to the centralizing policies of the high command and its political allies”. Independensi dari campur tangan pusat masih dapat dipelihara oleh pemimpin militer di Jawa Timur pasca peristiwa Madiun, meskipun hal itu menimbulkan ketidak-sukaan. Perubahan yang dilakukan Kolonel Sungkono, di antaranya dengan memberi kepercayaan dan membagi kekuasaan dengan pemimpin militer lokal serta memaafkan mereka yang terlibat dalam Peristiwa Madiun, adalah langkah pembenahan yang tentu tidak berkenan di antara perwira pembaharu di ibukota.

Kelompok Nasution di pusat menaruh curiga bahwa keterlambatan pasukan dari Jawa Timur dalam upaya pemulihan keamanan di Madiun karena di jajaran pimpinan militer Jawa Timur mendapat pengaruh politik dari Sayap Kiri. Sebenarnya FDR hanya sedikit terwakili di Karesidenan Kediri dan tidak memiliki pengaruh langsung pada staf Narotama maupun di antara komandan regional lainnya.^{iv}Memang benar bahwa FDR lebih menekankan pada keterlibatan rakyat dalam pertahanan dan konsep tentara revolusi (Kesimpulan dan Putusan Konperensi “Pesindo” – Pembelaan, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 190). Sikap ini didukung oleh pimpinan militer Jawa Timur, karena selaras dengan nilai *manunggal* dan *yok opo enake*. Akan tetapi, bagi elite Jawa Timur apa yang dilakukan FDR tetap merupakan kesalahan dan setuju untuk dikenakan *dendo*. Pimpinan militer di Jawa Timur berkeberatan atas operasi militer di Madiun, bukan karena ada keterikatan politis dengan FDR, tetapi karena mereka menganggap tindakan demikian bersikap otoriter dan tidak sesuai dengan pemahamannya tentang revolusi (Anderson, 1976: 37).

Seperti telah disinggung ada perbedaan tajam tentang konsep ketentaraan antara elite di Jawa Timur dan Badan Perjuangan di satu pihak dengan elite pusat di pihak lain. Elite di Jawa Timur dan Badan Perjuangan menghendaki suatu model tentara revolusi. Konsep ini lahir didasarkan pertimbangan bahwa negara RI yang baru berdiri terancam keberadaannya. Untuk mempertahankan kedaulatannya rakyat dengan segala cara mempersenjatai diri. Rakyat yang bersenjata ini kemudian disusun dalam bentuk ketentaraan. Dengan kata lain, tentara revolusi adalah rakyat bersenjata yang tersusun menurut ketentaraan sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Semangat menjadi andalan. Tentara revolusi tidak tunggal, banyak, tetapi tetap ada satu yang bersenjata lengkap dan selalu siap (Dasar dan Sifat Tentara Revolusi, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 190; Rekaman wawancara: Pudjiharjo, 2000). Konsep ini berbeda dengan konsep kelompok Nasution yang banyak berlatar belakang pendidikan militer Belanda. Dasar pikiran kelompok ini adalah adanya satu tentara yang kini sedang dalam perang. Berarti wadah tentara lebih dulu ada daripada ancaman, bahwa tentara lahir dari haribaan rakyat tidak banyak diperhitungkan.

Integrasi Wilayah Jawa Timur

Bagi elite Jawa Timur kedaulatannya terganggu ketika sebagian wilayah Jawa Timur dimasukkan dalam yuridiksi Jawa Tengah. Berdasar Penetapan Presiden No. 24 Tahun 1948, Propinsi Jawa Timur, tidak termasuk Karesidenan Madiun, dinyatakan sebagai daerah Militer Istimewa (Penetapan Presiden no. 24 Tahun 1948, Sekretariat Negara RI, ANRI, no. inv. 258). Daerah Madiun bukan lagi bagian dari Jawa Timur. Bagi elite, sulit dibayangkan kondisi sosial-ekonomi yang terjadi. Setelah sebagian wilayah diduduki musuh akibat Agresi Militer I, ditambah keharusan hijrah akibat

Persetujuan Renville, kaum pengungsi yang terus bertambah, dan blokade ekonomi yang dilakukan Belanda, menciptakan kondisi sosial ekonomi yang terus memburuk. Sumber ekonomi yang sudah sangat terbatas diperebutkan terlalu banyak orang. Sekarang wilayah dikurangi, jelas akan menambah kesulitan. Sebagian besar elite Jawa Timur merasa tidak puas. Elite di Jawa Timur juga merasa kurang dipercayai dan dirampas sebagian hak-haknya mengelola daerah oleh pusat. Meskipun Kolonel Soengkono dipulihkan dan dipercaya sebagai Gubernur Militer di wilayah ini, tapi ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat meningkat. Munculnya fenomena demikian menyebabkan Panglima Divisi I Kolonel Soengkono, S.T.C. Kediri Letnan Kolonel Soerachmat, S.T.C Surabaya Letnan Kolonel Kretarto, perwira Teritorial Mayor Tjiptoharsono, dan Kepala Staf Divisi I Letnan Kolonel Soewondo diminta menghadap Presiden di Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 1948 jam 10 pagi (Surat Perintah Presiden no. 15/P.T./48 kepada Panglima Divisi I, Sekretariat Negara RI, ANRI, no. in. 294). Hasil pertemuan tidak diumumkan, tetapi dapat diduga bahwa para elite diminta mengurangi resistensinya terhadap pusat.

Ada kecurigaan bahwa kebijakan pengurangan wilayah dirancang cuma dari belakang meja. Bagi elite di Jawa Timur, untuk menegaskan Negara Republik Indonesia tidak cukup diatur dari belakang meja saja, melainkan harus dipimpin dari tengah-tengah rakyat (Aliran Tan Malaka, Yogya Dokumenten, ANRI, no. inv. 354). Selain masalah Karesidenan Madiun, kecurigaan terhadap kebijakan pusat yang tidak memperhitungkan kondisi lapangan juga menyangkut keberadaan Dewan Pertahanan Daerah (DPD) dan Markas Pertempuran (MP). Kritik tajam dilontarkan terhadap DPD dan MP, keduanya produk pemerintah pusat. Antara DPD dan MP tidak jelas pembagian tugasnya (Laporan rapat

kilat, Kementerian Penerangan, ANRI, no. inv. 408).^v Bagi elite di Jawa Timur ini membuktikan tidak adanya koordinasi. Hanya akan menimbulkan kebingungan dan salah pengertian di lapangan.

TPTL: BENTUK KETIDAKPUASAN TERHADAP PUSAT?

Berkaitan dengan adanya kesepakatan Roem-Royen, Panglima Divisi I memandang perlu menentukan sikap. Ketegasan sikap diperlukan dan menjadi pegangan anggota Angkatan Perang di Jawa Timur. Intinya Angkatan Perang Jawa Timur memiliki 4 kesadaran, yaitu kesadaran perjuangan negara yang telah merdeka dan berdaulat, kesadaran menentukan sikap terhadap masalah-masalah politik negaranya, kesadaran memperhebat usaha kemiliteran dan kesadaran perang gerilya. Panglima juga mengingatkan akan tujuan perjuangan yaitu isi Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tipu muslihat Belanda serta agar tidak percaya lagi kepadanya. Lebih daripada itu, Panglima menegaskan sikapnya untuk melakukan Perjuangan Jangka Panjang (*long term struggle*) (Nasution, 1979: 559-561; Soewito, 1994: 575-578).

Seakan menutup mata terhadap perkembangan politik di tingkat nasional, elite di Jawa Timur terus melakukan konsolidasi. Ketidakpercayaan terhadap diplomasi mendorong untuk memikirkan suatu strategi perlawanan jangka panjang. Setelah melalui beberapa pertemuan yang dihadiri komandan brigade, komandan batalyon, staf dan aparat sipil, pada bulan Juni 1949 Divisi I berhasil melahirkan TPTL (Taktik Perang Tahan Lama). TPTL dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi militer dan sipil dalam menyingkapi konflik yang tak menentu ujungnya. Pedoman ini terdiri dari dua bagian, yaitu (1) perintah harian GM/Panglima Divisi I, (2) 5 pasal program nasional (lihat lampiran). TPTL dapat dilihat dari sisi berlainan. Dapat

dipandang sebagai upaya melengkapi dan menterjemahkan secara lebih operasional petunjuk atau program pemerintah pusat. Sebagai contoh, MBKD telah mengeluarkan sejumlah maklumat, pedoman dan instruksi untuk kepentingan pelaksanaan Pemerintahan Militer.^{vi} Akan tetapi mengenai bagaimana cara menggeliatkan kembali jawatan-jawatan sipil tidak banyak disinggung. Mungkin oleh MBKD tidak dianggap penting, sebab sejak diberlakukan Pemerintah Militer otomatis jawatan sipil di bawah kendali militer, sehingga penanganannya tidak perlu diatur tersendiri. Panglima Divisi I melengkapi kekurangan itu dengan mengeluarkan Perintah Harian tanggal 30 Juni 1949 (Wawancara dengan Karsono). Di sisi lain TPTL cermin ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Elite di Jawa Timur sejak semula tidak percaya pada strategi berunding. Bila dicermati isi dari “5 Fatsal Program Nasional” tampak bahwa elite menempatkan dirinya sebagai tokoh-tokoh yang mengendalikan negara RI. “5 Fatsal Program Nasional” sepantasnya disusun oleh pemerintah pusat, bukan elite daerah. Dari identifikasi nama “Program Nasional” jelas bahwa diperuntukan sebagai pedoman bagi pemerintahan pusat sekaligus untuk diketahui aparat di bawah. “5 Fatsal Program Nasional” adalah wujud kontribusi dan kepedulian elite di Jawa Timur dalam tugas berbangsa. MBKD lebih sibuk dengan pelaksanaan teknis dan operasional dari Pemerintah Militer. Masalah-masalah bangsa ke depan kurang mendapat perhatian. Sejatinya komunikasi elite di Jawa Timur dengan MBKD tidak banyak dilakukan. Konsultasi dan laporan lebih banyak langsung kepada Panglima Besar (Soewito, 1994: 581-582). Hubungan kurang serasi antara elite militer Jawa Timur dengan Nasution yang telah mencuat sejak diberlakukan ReRa bulan Mei 1948 ternyata belum mencair.

TPTL adalah buah pikiran elite, merupakan manifestasi keinginan. Butir-butir yang terekam di dalamnya memantulkan cita-cita sekaligus tujuan untuk apa bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Secara luas semua itu diarahkan untuk kepentingan rakyat. Belum seluruh cita-cita dan harapan itu terdokumentasikan, sebab TPTL baru sebagian. Lima pasal dari 11 pasal yang direncanakan. Sisanya yang 6 pasal tidak pernah terwujud, karena situasi politik tidak memungkinkan lagi para elite duduk bersama merumuskannya.

Pertahanan rakyat yang menjadi inti dari *Total People Defence* tidak luput dari perhatian elite. Sebagai acuan operasional di lapangan dikeluarkan petunjuk yang berisi pengertian, pedoman dan organisasi pertahanan rakyat. Pertama, dalam pengumuman yang dikeluarkan Divisi I yang dimaksud dengan pertahanan rakyat adalah seluruh rakyat ikut serta dalam pertahanan di segala bidang. Menjalankan pekerjaan masing-masing dengan giat dan selalu bekerja sama. Rakyat tidak harus bertempur. Inti dari pertahanan rakyat adalah mobilisasi. Mobilisasi diarahkan untuk menangani sejumlah masalah perjuangan, seperti lapangan pekerjaan, pendidikan, pengungsi, dan lain sebagainya. Caranya, secara garis besar meliputi penyediaan tenaga untuk membantu pemerintah dan melaporkan kekuarangan atau keganjilan dalam masyarakat. Bagian pengertian dalam pengumuman itu disertai contoh-contoh pertahanan rakyat. Kedua, bagian pedoman pertahanan rakyat berisi petunjuk praktis pelaksanaan. Jadi lebih bersifat operasional lagi. Secara garis besar isinya bagaimana gerakan dan sikap rakyat jika daerahnya telah diduduki musuh, bila daerahnya dipatroli dan bila daerahnya masih dalam keadaan aman. Bagian ini diakhiri dengan catatan peringatan berisi pemisahan tegas antara pejuang dan pengkhianat. Ketiga, secara organisatoris pertahanan rakyat terdiri dari pasukan

mobile, teritorial dan rakyat. Masing-masing mempunyai tugas sendiri. Pasukan mobile bertugas menyerang, teritorial bertugas bertahan dan rakyat bertugas memproses bahan makanan serta membantu pemerintah. Semuanya diatur oleh pemerintah dan pertahanan rakyat bagian dari program pemerintah. Untuk menggerakkan rakyat dibutuhkan orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Tentara hanya yang menyangkut teknis militer (Nasution, 1984: 251-259).

Ada hal yang cukup penting tentang petunjuk pertahanan rakyat yang dikeluarkan Divisi I. Petunjuk ini hampir-hampir tidak menyinggung kerjasama dengan KPPD. Tidak hanya petunjuk ini saja, tetapi TPTL juga tidak menyinggung tentang hal yang sama. Apakah kerjasama dengan KPPD tidak perlu secara eksplisit dirumuskan?^{vii} Apakah memang ada keinginan untuk meninggalkan KPPD?

Catatan:

- ¹ Menariknya nama tiga perwira ini diusulkan Presiden kepada PBAP, jadi bukan atas usul Sudirman sebagai PBAP (Surat Perintah Presiden No.5/P.T./48 kepada Panglima Besar Angkatan Perang, Sekretariat Negara RI, ANRI, no. inv. 291); Menurut Nasution penunjukan ketiga orang ini mewakili aliran yang ada di Angkatan Perang. Jenderal Mayor Susalit mewakili golongan eks Peta dan laskar, Jenderal Mayor Suwardi mewakili eks KNIL, dan Nasution menganggap dirinya mewakili golongan perwira muda dan bukan mewakili KNIL (Nasution, 1968: 156). Nasution adalah juga eks KNIL, sehingga dilihat dari latar pengalaman militer dalam panitia kecil ini terdapat 2 orang eks KNIL dan seorang eks PETA.
- ² Penetapan Presiden No. 1/1948 tanggal 2 Januari 1948 mengangkat Komodor Udara Suryadarma sebagai Kepala Staf Umum (KSU) Angkatan Perang dan Kolonel T.B. Simatupang sebagai wakilnya. Sementara KSU yang lama Urip Sumohardjo belum dibebastugaskan, telah diangkat KSU yang baru. Jenderal Sudirman diangkat sebagai PBAP Mobil. Jenderal Sudirman mengatakan tidak mengerti kepada siapa ia seharusnya bertanggung jawab, karena kesimpulan yang ditarik dari penetapan itu adalah KSU AP ada di atasnya (Nasution, 1968: 133-152).
- ³ Sukarno dikelilingi orang-orang birokrasi dan partai-partai politik yang beraneka ragam ideologinya, dalam realitas cita-citanya tiada yang tersealisasi selama revolusi. Sukarno juga jauh dan tidak memahami militer. Persoalan kedekatan dengan militer inilah yang oleh sebagian orang dianggap sebagai salah satu sebab kejatuhannya di kemudian hari (Onghokham, 1977: 11-12)
- ⁴ FDR tidak memiliki pengaruh langsung pada jajaran staf Divisi Narotama. Pengaruh terletak pada kesatuan, seperti Brigade 29, tetapi tidak seluruh batalyon dalam Brigade 29 mendapat pengaruh FDR (Anderson, 1976: 36; Latief, 1995: 67-82)
- ⁵ DPN (Dewan Pertahanan Negara) di pusat dan DPD (Dewan Pertahanan Daerah) di daerah merupakan wadah yang dibentuk berdasarkan UU No.6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya (Hariyono, 2008: 95-100; Notosusanto, 1984: 45). DPN dan DPD di bawah koordinasi Menteri Pertahanan, sementara MP di bawah Panglima TRI.
- ⁶ MBKD tidak kurang mengeluarkan 30 instruksi berkaitan dengan pelaksanaan Pemerintahan Militer (Nasution, 1979); Contoh lain, MBKD telah mengeluarkan Pedoman Bekerja Pemerintahan Militer Kecamatan, namun juga dipandang kurang operasional. Untuk itu Panglima Divisi I mengeluarkan edaran bertajuk Penuntun Beleid Pemerintah Militer Kecamatan (Soewito, 1994: 566-569).
- ⁷ Dalam maklumat dan instruksi yang dikeluarkan MBKD mengenai Pemerintahan Militer, keterlibatan KPPD tidak banyak dinyatakan secara eksplisit.

DAFTAR RUJUKAN

A. Arsip

- Delegasi Indonesia, 1947-1951, ANRI, Jakarta
Kementerian Penerangan, 1945-1949, ANRI, Jakarta
Sekretariat Negara, 1945-1949, ANRI, Jakarta
Yogya Dokumenten, 1946-1948, ANRI, Jakarta

B. Sumber Lisan

- Rekaman wawancara: Pudjiharjo. 2000. Surabaya: Badan Arsip Propinsi Jawa Timur
Wawancara: Karsono (Ketua DHC 45 Surabaya)

C. Terbitan Berkala

- Anderson, D.C., 1976, "The Military Aspects of the Madiun Affair", *Indonesia*, No.21 (April). Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, hlm. 1-63
Onghokham, 1977, "Sukarno Mitos dan Realitas", *Prisma*, No. 8 Agustus, Tahun VI. Jakarta: LP3ES, hlm. 3-14

D. Buku

- Bashri, Y. & Retno Sulffatni (Ed.), 2005. *Sejarah Tokoh Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa
Hariyono, 2008. *Penerapan Status Bahaya di Indonesia, Sejak Pemerintah Kolonial Belanda Hingga Pemerintah Orde Baru*. Jakarta: Pensil-324
Hatta, M. 1976. *Mendayung Antara Dua Karang*. Jakarta: Bulan Bintang
Ingleson, J. 2005. "Mohammad Hatta Cendekiawan, Aktivis, dan

Politikus", dalam Yanto Bahri & Retno Suffatni (Ed), *Sejarah Tokoh Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa. hlm. 36-47

Latief, M. H.1995. *Laskar Hizbullah Berjuang Menegakkan Negara RI*. Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Basyr PBNU

Nasution, A.H. 1968. *Tentara Nasional Indonesia II*. Jakarta: Seruling Masa

----- 1979. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 10*. Bandung: Disjarah-AD & Angkasa

----- 1984. *Pokok-pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa Lalu dan Yang Akan Datang*. Bandung: Angkasa

Notosusanto, N. (Ed.), 1984. *Pejuang dan Prajurit, Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*, (Jakarta: Sinar Harapan,), hlm. 45.

Onghokham, 1983. *Rakyat dan Negara.*, Jakarta: Sinar Harapan

----- 2009. *Sukarno, Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965*. Jakarta: Komunitas Bambu

Rahardjo, P., 1996. *Gerilya dan Diplomasi, Operasi Hayam Wuruk Sebuah Epik Dalam Revolusi*. Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Soewito, I.H.N.H., 1994. *Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan, Jilid 3*. Jakarta: Grasindo

Sutomo, S., 2008. *Bung Tomo Suamiku, Biar Rakyat Yang Menilai Kepahlawananmu*. Jakarta: Visimedia

Lampiran

PERINTAH HARIAN

1. Berdasarkan atas rencana konsolidasi organisasi dan pemerintahan militer Jawa Timur
2. Membaca laporan yang masuk dan hasil dari kesimpulan tersebut.
3. Mengingat pada pentingnya pembangunan kembali dari jawatan sipil untuk mempertahankan de fakto Republik Indonesia.
4. memerintahkan kepada para komandan:
 - STM Bojonegoro
 - STM Surabaya dan Madura
 - STM Kediri
 - STM Malang
 - STM Besuki
 Untuk memerintahkan kepada jawatannya:
 - a. Membangun kembali jawatan-jawatan sipil yang tugas kewajibannya bersamaan.
 - b. Meletakkan dasar organisasi bagi jawatan-jawatan tersebut dalam sub. A
 - c. Menghasilkan:
 - I. Mempergunakan keahlian jawatan untuk menjunjung rakyat untuk kepentingan

rakyat, hingga rakyat merasakan hasil dan menghargai adanya jawatan tersebut.

- II. Mendapatkan uang sedapat mungkin.
 - III. Mengumpulkan bahan dari musuh untuk menjadi bahan politik, ekonomi dan militer.
 - IV. Memukul musuh (Belanda) dengan jawatan tersebut.
- d. Tetap konsolidasi dan mengusahakan pendapat baru.
 - e. Mengadakan administrasi yang baik, dinamis, zakelirk, praktis dan sentralisasi administrasi.
5. pusat-pusat jawatan di Divisi diperintahkan:
 - a. Membuat peraturan dengan jawatan sipil yang bersangkutan, sehingga jawatan itu bekerja atas dasar peraturan tersebut.
 - b. Mengadakan peraturan lain-lain untuk bekerja (menghasilkan umpama guna pendaftaran larangan, dll)
 - c. Menuntun dan kontrol
 - d. Menghimpun laporan dan mengadakan perbaikan.
 6. Yang dimaksud dengan jawatan adalah:
 - a. Geni/Jawatan Bangunan dan Jawatan Pekerjaan Umum.
 - b. Persenjataan

- c. Perhubungan, PTT, PRI, Listrik/Gas
- d. Kendaraan, DAMRI, kereta api
- e. Perlengkapan, Perekonomian, PPN, PPGN, Candu/Garam, Kehutanan, Pertanian, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pengairan (irigasi), Perikanan, Perminyakan, Perhewan dan sebagainya.
- f. Keuangan: bea cukai, pajak, Bank Rakyat, kas negeri. Pegadaian, Pasar dan sebagainya.

7. Perintah ini supaya dapat terwujud dan tetap bekerja dan usaha ke arah perbaikan (satu dan lain disesuaikan dengan keadaan di tempat setempat).

Dikeluarkan di : Tempat
Pada Tanggal : 30 Juni 1949
Jam : 7 pagi

Gubernur Militer Jawa Timur
Panglima Divisi I-TNI

Ttd

(Kolonel Sungkono)

5 FATSAL PROGRAM NASIONAL

Sampai sidangnya kemarin tanggal 21 Juni 1949, Panitia Perinci berhasil mengerjakan 5 fatsal dari 11 Program Nasional. Fatsal yang telah diperinci ialah:

1. STATUS NEGARA

Memperjuangkan supaya selambat-lambatnya pada tanggal 1-1-50 telah terbentuk satu Negara Nasional Indonesia Merdeka yang berdaulat meliputi seluruh Indonesia serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kedaulatan Rakyat, Kebangsaan, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial.

II. LUAR NEGERI

a. Politik

- 1. Mewujudkan dengan nyata-nyata dengan luar negeri yang sudah ada.
- 2. Menerima tiap-tiap pengakuan atas Republik Indonesia yang telah dinyatakan oleh negara-negara merdeka manapun, dengan tidak memandang ideologinya.
- 3. Mengusahakan bertambahnya jumlah negara yang mengakui Republik.
- 4. Mengihhtiarkan keanggotaan penuh (*membership*) dari keluarga badan-badan

- internasional (*family of nation*)
- 5. Bantu membantu bangsa-bangsa dan negara-negara lain dalam memperjuangkan kemerdekaan menentang imperialisme.
- 6. Menjalankan diplomasi yang aktif serta sebanyak mungkin diumumkan.
- b. Ekonomi/perdagangan/lalu lintas
 - 1. Mengusahakan kerjasama di lapangan ekonomi dengan negara-negara yang berkepentingan sama.
 - 2. Mengadakan penukaran jual beli alat-alat pembangunan dan pertahanan.
 - 3. Mengusahakan supaya Indonesia selekas-lekas-nya masuk dalam pehubungan lalu lintas internasional (darat, laut, dan udara, pos, telegram dan radio)
- c. Pembangunan internasional yang tak resmi Memajukan perhubungan dengan organisasi internasional yang tidak resmi mengenai lapangan agama, ilmu pengetahuan, kebudayaan, perguruan, pemuda, wanita, olahraga, dsb.

- d. Persiapan tenaga:
 - Mengadakan pendidikan tenaga buat urusan luar negeri.

III. PERTAHANAN

- 1. Menegaskan masih adanya keadaan dalam bahaya selama tentara Belanda masih ada di Indonesia.
- 2. Menjamin terwujudnya pertahanan rakyat (*people defence*) oleh pemerintah dan rakyat serta menyempurnakan peraturan-peraturan yang bertalian dengan itu.
- 3. Menyempurnakan niat dan syarat pertahanan rakyat, terutama dalam lapangan persenjataan.
- 4. Mengingat dan menyempurnakan latihan ketentaraan di kalangan rakyat serta latihan bersama dengan tentara.
- 5. Memperdalam dan memperluas penerangan berkenaan dengan pertahanan rakyat.
- 6. Menyempurnakan perawatan anggota tentara, barisan, dan korban perang.

IV. PEREKONOMIAN

- 1. Mewujudkan susunan ekonomi nasional yang bebas dari kekuasaan modal asing dan melenyapkan sisa-sisa susunan ekonomi jajahan.
- 2. Mewujudkan ekonomi yang teratur berdasarkan plan kemakmuran dengan rencana produksi nasional yang rasional serta memperbesar

kesanggupan dan tenaga perjuangan rakyat dengan mengatur:

- a. usaha yang dikuasai negara
 - b. Usaha koperasi dan kolektif.
 - c. Usaha perseorangan sesuai dengan fasisl 33 UUD
3. Perusahaan vital (pengangkutan, perhubungan, listrik, gas, air, tambang dan alat-alat penerangan yang penting bagi negara, dsb.) dikuasai oleh negara dengan memberi kerugian di mana perlu kepada yang mempunyainya.
4. Mengadakan undang-undang koperasi dan menggiatkan majunya koperasi bertujuan membangun perekonomian yang kooperatif.
5. Mengatur pemasukan barang-barang berdasarkan keperluan Rakyat dalam hidupnya sehari-hari serta tujuan mempertinggi hasil produksi dan memperkokoh pertahanan Negara.
6. Mengawasi dan/atau menguasai pengeluaran barang-barang dengan berpedoman kepentingan rakyat dan negara.
7. Membantu memperbanyak hasil dan mempertinggi

kwalitet produksi rakyat, istimewa produksi ekspor.

8. Mengatur pemakaian alat-alat lalu lintas dan pengangkutan seefektif-efektifnya.
9. Menguasai dan/atau memimpin secara rasional segala produksi dan distribusi bahan-bahan yang penting untuk penghidupan sehari-hari dengan mempergunakan alat-alat produksi dan distribusi yang ada di masyarakat.
10. Dalam segala usaha pemerintah kejurusan kemakmuran rakyat haruslah turut serta wakil-wakil organisasi rakyat (massa organisasi) dan tenaga-tenaga ahli dan berpengalaman.
11. Mendidik dan membimbing rakyat dalam perekonomian.
12. Memperbanyak dan meratakan penempatan tenaga-tenaga ahli ekonomi.

V.

VI. AGRARIA

1. Menyatakan hukum agraria yang baru buat seluruh negara atas dasar milik perseorangan dengan tidak mencegah perusahaan pertanian secara kolektif.
2. Mengusahakan supaya setiap petani memiliki

- sebidang tanah yang dapat menjamin penghidupan layak baginya berumah tangga.
3. Meluaskan tanah buat keperluan kaum tani dengan secara mengembalikan tanah kepada rakyat dan *erfpacht*, *kleinlandbouw*, *consessi* dan *landman* yang terang tidak dipergunakan.
 4. Memberi kredit yang mudah dan murah bagi kaum tani.
 5. Menyusun organisasi kaum tani untuk penjualan produksinya di dalam dan di luar negeri.
 6. Mengusahakan hapusnya segala beban rakyat daripada peninggalan feodalisme, yang berhubungan dengan hak tanah seperti rodi, pancang, dsb.
 7. Menghapuskan kedok-system (pinjam nama) dan segala macam kredit dari perseorangan kepada tani seperti ijon, mindring, dsb.
 8. Melindungi buruh tani dan tani kecil dalam usahanya mengerjakan/atau menyewa tanah orang lain dengan mengadakan peraturan-peraturan tentang pembagian hasil dan penanggungan bebas yang adil.
 9. Mewujudkan industri rakyat di desa dan mengusahakan transmigrasi.
 10. Mengintensivkan pertanian dengan jalan memperbaiki bibit, memperluas pengairan, dsb.
 11. Mendayaupayakan pembagian untung bagi tani kalau ia menghasilkan untuk pabrik.
 12. Menyatakan dan menguasai usaha pengairan dan turut serta organisasi tani dalam pembagian air (Soewito, 1994: 555-560).

